



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN.....
TENTANG**

**RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI
AKIBAT SESAR KENDENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa gempa bumi akibat sesar kendeng merupakan peristiwa alam tektonik yang memiliki potensi ancaman bencana gempa dan menghasilkan getaran diatas permukaan yang dapat terjadi sewaktu- waktu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian dan dampak psikologis;
- b. bahwa Kabupaten Semarang dan Kota Semarang merupakan wilayah yang rentan terdampak langsung Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng, maka dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA GEMPA BUMI AKIBAT SESAR KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.
6. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
10. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa

terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

12. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
13. Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng yang selanjutnya disebut Rencana Kontinjensi Bencana adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengurangan potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana gempa bumi akibat sesar kendeng.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana gempa bumi akibat sesar kendeng secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Semarang dan dunia usaha serta masyarakat di tingkat Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat gempa bumi akibat sesar kendeng saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Daerah untuk penanganan darurat gempa bumi akibat sesar kendeng;
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan bencana gempa bumi akibat sesar kendeng.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sifat rencana kontinjensi bencana;
- b. penyelenggaraan rencana kontinjensi bencana;
- c. rencana kontinjensi bencana;
- d. pelaksanaan; dan
- e. evaluasi rencana kontinjensi.

BAB IV SIFAT RENCANA KONTINJENSI

Pasal 4

- (1) Sifat Rencana Kontinjensi Bencana meliputi:
 - a. partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Rencana kontinjensi bencana yang bersifat partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Kontinjensi Bencana melibatkan semua pihak.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu terbaru sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan rencana kontinjensi bencana, berdasarkan pada potensi aktivitas kegempaan sesar Baribis-Kendeng di Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan rencana kontinjensi bencana gempa bumi akibat sesar kendeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengantisipasi :
 - a. Dampak gempa bumi akibat sesar kendeng; dan
 - b. Longsor dan likuifaksi dampak gempa bumi akibat sesar kendeng.
- (3) Penyelenggaraan Rencana Kontinjensi Bencana di Daerah meliputi 2 (dua) wilayah administrasi yaitu:
 - a. Kabupaten Semarang;
 - b. Kota Semarang
- (4) Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 6

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bencana gunung api.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi Bencana gempa bumi akibat sesar kendeng di wilayah Kabupaten Pemalang, dan Kota Semarang, Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat.

BAB VIII EVALUASI RENCANA KONTINJENSI BENCANA

Pasal 8

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang;
dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

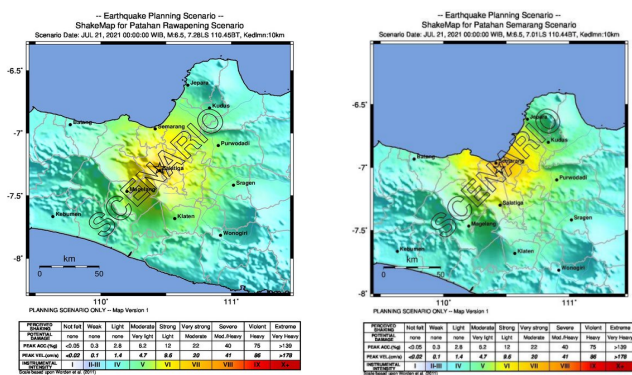
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR TAHUN
.....TENTANG RENCANA
KONTINGENSI BENCANA GEMPA
BUMI AKIBAT SESAR KENDENG
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
SITUASI

1.1 Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)
1.1.1 Karakteristik Ancaman Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng

Sesar Kendeng yang merupakan jenis sesar naik, sesar ini merupakan satu dari ratusan sumber gempa baru yang ditambahkan dalam revisi peta gempa bumi nasional, apabila terjadi pergerakan pada sesar kendeng dapat dapat memicu gempa dengan magnitudo 6,5-7,0. Kondisi tutupan lahan di sepanjang jalur sesar dan sekitarnya mayoritas merupakan kawasan terbangun dengan guna lahan pemukiman, sehingga hal ini menimbulkan resiko yang tinggi jika terjadi gempa di sekitar jalur sesar. Sesar Kendeng yang merupakan jenis sesar naik melewati Jawa Tengah terbagi menjadi 7 segmen yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Rawapening, dan Purwodadi dengan total panjang 152 km. Lebih lanjut, rencana kontingensi ini akan terkait Sesar Kendeng Segmen Semarang yang memiliki panjang 34 km dan memberikan risiko ke 12 kabupaten/kota sebagaimana lebih detail dalam Tabel 1.

Menurut para peneliti kegempaan sesar Kendeng dapat berpotensi menimbulkan gempa dengan Magnitudo Maksimum M 6,5, skala intensitas maksimum VII di wilayah Kota/Kabupaten yang dilalui oleh sesar tersebut. Pergerakan sesar tersebut dapat memberikan dampak yang cukup parah bagi wilayah-wilayah lain yg berada di sekitar sesar, ditambah lagi dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan tentunya akan menambah dampak kerusakan bagi berbagai aspek kehidupan.



Gambar 1. Skenario gempa sesar kendeng segmen rawa pening (kiri), Skenario gempa sesar kendeng segmen semarang (Sumber:BMKG)

Kekhawatiran terpicunya gempa bumi besar karena keberadaan Sesar Kendeng sudah mulai diperhitungkan oleh para ahli. Selain sebagai media rambat gelombang gempabumi dari sesar-sesar aktif lainnya di Jawa Tengah, Sesar Kendeng dapat juga menjadi sumber gempabumi itu sendiri. Gempabumi tidak dapat ditentukan kapan terjadinya, maka usaha terbaik adalah bagaimana kita mempersiapkan diri jika gempa itu benar-benar datang. Itulah usaha mitigasi bencana, yaitu usaha untuk meminimalkan risiko atau akibat dari bencana.

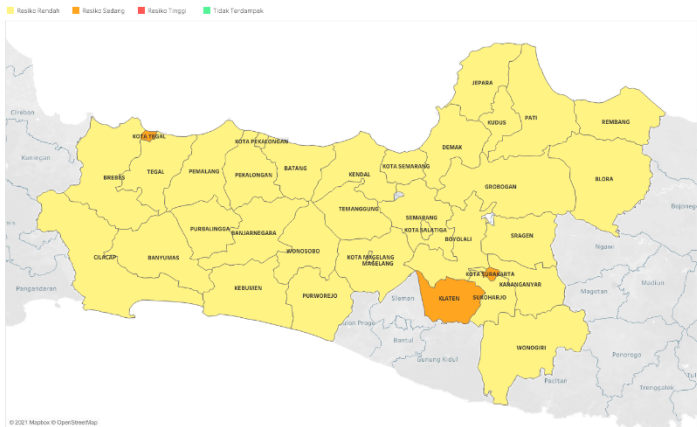
1.1.2. Karakteristik Ancaman COVID-19

Di Indonesia wabah COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 28 Agustus 2021 sudah menyebar ke 34 provinsi dengan total kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi sudah mencapai 4.066.404 orang, kasus kematian 131.372 orang dan 3.707.850 orang dinyatakan sembuh. Sampai dengan tanggal 7 September 2021, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 474.991 jiwa, kasus sembuh 436.754 jiwa, dan meninggal 31.326 jiwa. Di 12 kabupaten/kota yang berpotensi terdampak ancaman gempa bumi, memiliki dominasi tingkat risiko COVID-19 pada tingkat Sedang, dengan Kabupaten Kudus dan Grobogan dengan tingkat Rendah, sebagaimana dijelaskan secara detail dalam Tabel 1..

Tabel 1. Tingkat Risiko 12 Kabupaten/Kota atas COVID-19 dan Gempa Sesar Kendeng-Semarang

No	Kabupaten	Tingkat Risiko	
		COVID-19 (menurut covid19.go.id)	Gempa (Skala MMI)
1	Kota Semarang	Sedang	VII
2	Kabupaten Semarang	Sedang	VI-VII

Gambar 2. Peta Zonasi Risiko COVID-19 Provinsi Jawa Tengah
Sumber: <https://corona.jatengprov.go.id/data>



1.2 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana gempa bumi bersumber di darat Sesar Kendeng, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana.

Skenario kejadian yang digunakan yaitu gempa dengan magnitudo 6.5 SR. Lokasi gempa atau episentrum terletak di koordinat 7.01° LS, 110.44° BT (Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang), berada pada kedalaman 10 Kilometer dan Guncangan gempa juga terjadi koordinat 7.28° Lintang Selatan, 110.45° Bujur Timur di Daerah Rawa Pening kedalaman 10 Kilometer. Goncangan gempa terjadi selama ± 60 detik Baik nilai magnitudo yang dipakai sebagai maksimum nilai magnitudo yang mungkin terjadi maupun lokasi titik pusat gempa mengadopsi skenario yang dibuat oleh Badan

Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Yang membedakan adalah dimasukkannya nilai amplifikasi (PGA) untuk memberikan pendekatan besarnya nilai intensitas getaran di permukaan serta sejauh mana dampak guncangan gempa tersebut terhadap wilayah yang berada di sekitar pusat gempa. Intensitas getaran di batuan dasar (SB) mengalami amplifikasi (penguatan) ketika melewati lapisan dangkal dengan nilai penguatan yang berbeda tergantung jenis lapisan yang dilewatinya. Dampak getaran di permukaan ketika melewati lapisan dangkal yang lunak akan lebih kuat jika dibandingkan dengan dampak bila melewati lapisan dangkal yang keras.

Skenario detail kejadian gempabumi terjadi pada hari HH siang, pukul 13.00 WIB, pusat gempa berada di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, tepatnya pada koordinat 7.01° Lintang Selatan, 110.44° Bujur Timur di kedalaman 10 Kilometer. Guncangan gempa terjadi selama ± 60 detik. Guncangan gempa juga terjadi koordinat 7.28° Lintang Selatan, 110.45° Bujur Timur di Daerah Rawa Pening kedalaman 10 Kilometer. Guncangan gempa terjadi selama ± 60 detik, Kabupaten Semarang Guncangan gempa terjadi di sepanjang jalur sesar arah barat-timur. Gempa susulan terjadi di sekitar episentrum gempa dan di sepanjang jalur sesar. Ancaman sekunder yang dapat terjadi sesaat setelah gempa dapat berupa longsor dan likuifaksi. Longsor dapat terjadi di Kabupaten Semarang di sekitar radius gempa yang berada di sesar kendeng yang berada di daerah rawa pening sedangkan di Kota Semarang di area rentan longsor dan dekat/ dilalui jalur sesar (dapat dilihat wilayah rentan longsor pada peta) 15 menit - 30 menit setelah terjadinya gempa utama.

Berikut Tabel 2 yang merupakan pokok-pokok ringkasan Skenario Kejadian Bencana dan Asumsi dampak dari bencana yang terjadi. Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan peta risiko atau peta bahaya, yang mempertimbangkan aspek kerentanan dan kapasitas publik/swasta/komunitas yang terkena dampak bencana. Berupa lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan. Dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi.

Tabel 2. Pokok-Pokok Ringkasan Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Asumsi Waktu Kejadian	Hari/Tanggal :XXX / Waktu/Jam : 13.00 WIB
Lokasi, Durasi, Intensitas, Ancaman Lanjutan, dll	Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dan daerah Rawa Pening, Kabupaten Semarang Kordinat : 7.01° LS, 110.44° BT dan 7.28° LS, 110.45° BT Kedalaman : 10 km Durasi : 60 detik. VIII Skala MMI : 6.5 SR Ancaman Lanjutan : Longsor, Luapan Rawapening, Likuifaksi
Cakupan Wilayah Terdampak	Lihat Tabel 1
Bahaya Primer	Runtuhan Bangunan
Bahaya Sekunder	Tanah Longsor, Luapan Rawapening, Likuifaksi, <i>Banjir Rob</i> dan COVID-19

Tabel 3. Asumsi Dampak Kejadian

Asumsi Dampak Kejadian	
ASPEK KEPENDUDUKAN	Total penduduk terpapar di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang berdasarkan asumsi dampak maksimum sesar Kendeng adalah ±2.734.135 (berdasarkan KRB Prov. Jawa Tengah) penduduk di 2 Kota Semarang dan Kabupaten Semarang) dengan rincian sebagai berikut:
	Kota Semarang memiliki kerentanan sosial yang sangat tinggi mengingat kepadatan Kawasan terbangun yg tersebar di semua wilayah administrasi memberikan dampak signifikan pada aspek kependudukan. • Jumlah penduduk terpapar: 1.704.627 jiwa (jumlah penduduk di 16 Kecamatan) ◦ Jumlah meninggal (2%): 34.092 jiwa ◦ Jumlah penduduk belum ditemukan (18%): 306.832 ◦ Luka berat (10%) dari penduduk luka-luka: 170.460 ◦ Luka sedang (30%) dari penduduk luka-luka: 511.388 ◦ Luka ringan (40%) dari penduduk luka-luka: 1.022.776 • Jumlah penduduk yang mengungsi (40%): 681.874 • Terinfeksi COVID-19 (2%) : 34.092 Wisatawan terdampak: 9.074 jiwa, terdiri dari: • Wisatawan asing: 18 jiwa • Wisatawan domestik: 9.056 Jiwa
	Kabupaten Semarang Jumlah penduduk total (delapan Kecamatan) seluruh daerah terdampak sebanyak 387.120 jiwa Jumlah meninggal ± 1% (dari jumlah total delapan kecamatan) dari jumlah penduduk yaitu sekitar 3.871 jiwa: • Jumlah penduduk belum ditemukan (1%): 3.871 • Jumlah penduduk yang mengungsi (40%): 154.848 jiwa • Jumlah penduduk luka-luka (20%): 77.424 jiwa ◦ Luka berat (10%) dari penduduk luka-luka: 7.742 jiwa ◦ Luka sedang (25%) dari penduduk luka-luka: 19.310 jiwa ◦ Luka ringan (65%) dari penduduk luka-luka: 50.207 jiwa • Risiko terinfeksi COVID-19 (1%):1.294 Wisatawan terdampak: 1.249 jiwa, terdiri dari • Wisatawan asing: 1 jiwa • Wisatawan domestik: 1.248 Jiwa

ASPEK FISIK	Kota Semarang ● Bangunan terdampak yang rusak 40% : 170.462 bangunan ○ Rusak berat/roboh (24%): 102.277 ○ Rusak ringan (76%): 323.879 ● Jalan terdampak ○ Jalan Nasional: ■ Jalan Walisongo, terdampak ± 4,8 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Siliwangi,terdampak ± 2,6 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Tol Jatingaleh-Gayamsari terdampak ± 3 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Tol Kaligawe Gayamsari, terdampak ± 1 Km, rusak berat ± 0,3 Km ○ Jalan Provinsi: ○ Jalan Majapahit, terdampak ± 3,3 Km, rusak berat ± 1 Km ○ Jalan Kota: ○ Kolektor : ■ Jl Gunung Kelir Raya, terdampak ± 0,5 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Kyai Gilang, terdampak ±3,7 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Rowosari Atas, terdampak ± 5,5 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Cisadane, terdampak ± 1,8 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Laut Mangunharjo, terdampak ± 1,2 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Karanganyar, terdampak ± 1,9 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Gunungkelir Raya, terdampak ± 0,5 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Tapak Raya, terdampak ± 0,7 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Tugurejo Raya, terdampak ± 0,3 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Stasiun Jarakah, terdampak ± 1 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Galungan Raya, terdampak ± 2,2 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Hanoman Raya, terdampak ± 0,6 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Padma Boulevard, terdampak ± 0,6 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Jembawan XI terdampak ± 3,5 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Jembawan Raya, terdampak ± 1,3 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Abdul Rahman Saleh, terdampak ± 1,1 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Puspogiwang, terdampak ± 1,1 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Boong Salaman, terdampak ± 1,0 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Basudewa, terdampak ± 0,7 Km, rusak berat ± 0,3 Km
---------------------------	--

	■ Jl Sudoyono, terdampak ± 4,4 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Pahlawan, terdampak ± 1,1 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl MT Haryono, terdampak ± 1,2 Km, rusak berat ± 0,3 Km ■ Jl Kyai Saleh, terdampak ± 1,2 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Sompok, terdampak ± 1,7 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Lamper Tengah, terdampak ± 1,4 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl Fatmawati Raya, terdampak ± 3,4 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Tentara Pelajar, terdampak ± 2,3 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Kedungmundu Raya, terdampak ± 3,4 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Pamularsih, terdampak ± 2,0 Km, rusak berat ± 0,5 Km ■ Jl WR Supratman, terdampak ± 1,5 Km, rusak berat ± 0,5 Km ○ Arteri : ■ Jl Jend. Soedirman, terdampak ± 4,3 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Pandanaran, terdampak ± 3,9 Km, rusak berat ± 1 Km ■ Jl Urip Sumoharjo, terdampak ± 1,3 Km, rusak berat ± 0,5 Km ● Total terdampak ± 73 km, rusak berat ± 33,4km ○ Jembatan terdampak: 1 buah jembatan pada jalan nasional, 6 jembatan di jalan provinsi dan 10 jembatan di jalan kabupaten/kota. Jembatan putus: 2 buah jembatan sepanjang Jl. Siliwangi rusak berat. ○ Perkantoran Bisnis di wilayah Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah (Kawasan Simpang Lima, Kawasan Jl Pahlawan, Pandanaran, Jl A Yani, Jl MT Haryono Peterongan, Jl Siliwangi). ○ Perkantoran Pemerintahan: ■ Kantor Dinas Pemkot dan Pemprov : 160 Unit di semua Kecamatan Kota Semarang ■ Kantor BUMN/BUMD 6 Unit ■ Kantor Kecamatan: 16 Unit ■ Kantor Desa/Kelurahan: 177 Unit tersebar di semua Kecamatan Kota Semarang ■ Instansi Militer, Penerbat (Penerbangan Angkatan Darat), Polrestabes Semarang, Kantor PomDam. ● Fasilitas Satuan Pendidikan ○ Perguruan Tinggi: 59 Unit ○ Sekolah Menengah Pertama :139 Unit ○ Sekolah Menengah Atas : 124 Unit ○ Sekolah Dasar/MI : 142 Unit ● Fasilitas Kesehatan ○ Rumah Sakit terdampak rusak parah 13 unit
--	--

	○ Puskesmas terdampak kerusakan parah 14 Unit di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan. Puskesmas terdampak kerusakan sedang 9 Unit di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan gayamsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari. Puskesmas terdampak kerusakan ringan 19 Unit di Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara. ○ ● Tempat ibadah terdampak ± 980 Unit di Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngliyan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Mranggen. ● Tempat Wisata terdampak : Semarang Zoo, Taman Lele, (Kecamatan Ngaliyan), Sam Poo Kong, Pantai Marina & PRPP, Museu, Ronggowarsito (Kecamatan Semarang Barat), Lawang Sewu,(Kecamatan Semarang Tengah), Pusat Jajanan Pandanaran, Kampung Pelangi, Taman Indonesia Kaya, Simpang Lima(Kecamatan Selatan), Masjid Agung Jawa Tengah(Kecamatan Gayamasari), Museum Mandala Bhakti, (Kecamatan Semarang Selatan), Candi Tugurejo, (Kecamatan Tugu) Hotel terdampak : 5 Unit (Kecamatan Semarang Barat) 22 Unit (Kecamatan Semarang Tengah) 3 Unit (Semarang Selatan) ± 20 unit (Semarang Tengah) ● Fasilitas PLN/Gardu Induk yang terganggu: GI Krapyak (150 kV), GI Pandean Lamper (150 kV), GI Kalisari (150 kV), GI Randugarut (150 kV), GI Simpang Lima (150 kV). ● Gangguan distribusi PDAM, sumber air baku di permukaan, daerah 13 Kecamatan di Kota Semarang, terutama jaringan pipa PDAM yang berada di utara jalur patahan Kendeng Semarang, pakar ± 51.241.168 lt/detik dan sumber air tanah dari Kawasan Gampangan, Kali Pancur, Ngaliyan, Setum terhenti. Pasokan dari Jaringan Pipa PDAM yang sebagian besar berasal dari selatan Kota Semarang sekitar ±25.000.000 lt/detik terhenti. Instalasi Pengolahan Air Baku di Kota Semarang berfungsi hanya 50% atau hanya sebesar 12.500.000 lt/detik karena instalasi di di sepanjang sesar kendeng Kota Semarang terputus dan mengganggu distribusi air ke Kota Semarang bagian utara sesar kendeng segmen Kota Semarang.
--	---

	● Gangguan distribusi pipa gas di Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. ● Gangguan distribusi pipa BBM di Kawasan Bandara A Yani, Kecamatan Semarang Barat, dan gangguan pada penampung BBM di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur. ● Industri terdampak di Kawasan : 1. Kawasan Industri Wijayakusuma (Kecamatan tugu) (Makanan, garmen, elektronik, dll 100 jenis izin industri) 2. Kawasan Industri Candi (Kecamatan Ngaliyan) Banyak jenis industri 3. Sentra Industri Ikan Asap (Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara) ● Pasar terdampak : Pasar Mangkang, Pasar Jarakah, (Kecamatan Ngaliyan). Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Mrican, (Kecamatan Semaran. Selatan). Pasar Karangayu (Kecamatan Semarang Barat). Pasar Johar Lama, Sentra Perdagangan MT Haryono (Semarang Tengah). Pasar Pedurungan (Kecamatan Pedurungan). Pasar Kokrosono (Kecamatan Semarang Utara). Pasar Gayamsari (Kecamatan Garamsari). Sentra Perdagangan Jurnatan (Kecamatan Semarang Tengah) ● Utilitas transportasi: ○ Kota semarang ■ 1 Terminal: Terminal Bus Mangkang (Kecamatan Tugu) ■ 4 Stasiun: Stasiun Mangkang, Stasiun Jarakah (Kecamatan Tugu), Stasiun Semarang Poncol, Semarang Tawang (Semarang Utara) ■ 1 Bandara Ahmad Yani (Semarang Utara) berada di utara sesar sejauh 4 km. ■ Rel kereta api sepanjang ±.16.41 km berada di atas sesar. ■ 1 Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang Utara)
--	--

	Kabupaten Semarang ● Bangunan terdampak yang rusak 98.000. bangunan ○ Rusak berat/roboh (20%): 19.600 ○ Rusak ringan (80%): 78.400 ● Jalan Nasional terdampak terdampak ○ Jl. Semarang-Bawen (4,2km) ○ Jl. Bawen- Surakarta (10km) ○ Jl. Bawen-Jogja (10,2km) ○ Jl. Tol Semarang-Surakarta (8,17km) ● Jalan provinsi: ○ Jl. Salatiga-Kedungjati (21,2km) ● Jalan kabupaten & Jalan lokal: ○ Ruas Klepu-Pringapus (2km) ○ Ruas Klepu-Kemasan (2,4km) ○ Ruas Pringapus-Kemasan (1,05km) ○ Ruas Kemas-Mandiro (6,3km) ○ Ruas Kemas-Jandirejo (6,35km) ○ Ruas Candirejo-Borangan (9,75km) ○ Ruas Candirejo- Banger (4,9km) ○ Ruas Lemahireng-Pringapus (5,65km) ○ Ruas Lemahireng-Kadangan (6,8km) ○ Ruas Pringapus-polosiri (7,52km) ○ Ruas Pringapus Ngajaran (5,85km) ○ Ruas Harjosari-Doplang (3,9km) ○ Ruas Doplang-Milir (4,8km) ○ Ruas Rengas-Bawen (2,35km) ○ Ruas Bawen-polosiri (4,1km) ○ Ruas Tuntang-Karanglo (7,55km) ○ Ruas Karanglo-Ngajaran(11,130km) ○ Ruas Jelok-polosiri (3,1km) ○ Ruas Biringin-Kalikurmo (10,4km) ○ Ruas Bringin-Banding (5,2km) ○ Ruas Gogodalem-Kalikurmo (8,15km) ○ Ruas Jambu Banyu Biru (5,1km) ○ Ruas Telomoyo-Tuntang (4,25km) ○ Ruas Candran (3,75km) ○ Ruas Delik-Pabelan (4,25km) ○ Ruas Tlogo-Karangtengah (4,75km) ○ Ruas Pake-Sendang (3,5km) ○ Ruas Gogodalem-Plumutan(8,1km) ○ Ruas Ujung-ujung - Dadapayam (12,6km) ○ Ruas Senowo-Sendang (4,7km) ○ Ruas Senowo-Dadapayam (5,2km) ○ Ruas Banyubiru-Sepakung (8km) ○ Ruas Banyubiru-Wirogomo (7,4km) ○ Ruas Kebondowo-Sepakung (6,1km) ○ Ruas Banyubiru-Candran (11,5km) ○ Ruas Tegarong-Sepakung (3,5km) ○ Ruas Kauman Lor-Semowo (4,26km) ○ Ruas Kauma Kidul-Semowo (4,6km) ○ Ruas Bapi-Sukharjo (6,2km) ○ Ruas Sero-Tukang (5,5km) ○ Ruas Banding-Boro (5,4km) ○ Ruas Gamaran-Semowo (2km) ○ Ruas Gedangari-Sumogawe (5,4km) ○ Ruas Nogosaren-Sepakung (7,4) ○ Ruas Suruh-Barukan (4km)
--	---

	○ Ruas Barukan-Sumberejo (3,5km) ○ Ruas Suruh-Krandon Lor (4,4km) ○ Ruas Suruh-Bonomerto (7,3km) ○ Ruas Medayu-Kadungringin (9,2km) ○ Ruas Plumbon-Kentang (7,27km) ○ Ruas Suruh-Semagu (4,1km) ○ Ruas Suruh-Ketanggi (3,85km) ○ Ruas Mancar-Dersasari (6,3km) ○ Ruas Karangduren-Keboan (4,7km) ○ Jl. Lingkar P. Hewan-Ambarawa (0,5Km) ○ Jl. Yos Sudarso (0,7km) ○ Jl. Doplang (0,6km) ○ Jl. Dr. Sutomo (1,3km) ○ Jl. Brigjend Sudiarto (0,5km) ○ Jl. Sanggrahan (1,25km) ○ Jl. Slamet Riyadi (0,6km) ○ Jl. Pemuda (0,4km) ○ Jl. Naryo Admajan (0,35km) ○ Jl. Kartini (3,8km) ○ Jl. Lanjang (0,8km) ○ Jl. Tentara Pelajar (1,1) ○ Jl. Bougenvile I (0,65km) ○ Jl. Bougenvile II (0,60km) ○ Jl. Bougenvile III (0,65km) ○ Jl. Musium Kereta Api (0,75km) ○ Jl. Anggrek (0,8km) ○ Jl. Tegalrejo (0,5km) ○ Jl. Kepatihan (2,7km) ○ Jl. Tanjung Sari (0,2km) ○ Jl. Karanganyar I, II (1,1km) ○ Jl. Karanganyar-Tambakboyo (4,7km) ○ Jl. RSUD-Bejaten (0,3km) ○ Jl. Pasar Lanang (0,4km) ○ Jl. Tambakboyo-Kupang (0,3km) ○ Jl. Bawen II (0,75km) ○ Jl. Bawen III (0,35) ○ Jl. Bawen IV (0,9km) ○ Jl. Bawen V (0,4km) ○ Jl. Bawen-Doplang (1,1km) ○ Jl. Doplang II (0,4km) ○ Jl. Doplang I (1,05km) ○ Jl. Baran III (0,8km) ○ Jl. Baran IV (0,5km) ○ Jl. Baran I (0,15km) ○ Jl. Jetis-Kenteng (1,25km) ○ Jl. Kenteng I (0,2km) ○ Jl. Gondoriyo-Kebondalem (2,85km) ○ Jl. Nias (0,65km) ○ Jl. Lingkar Wisata Bandungan (1km) ● Jembatan terdampak: 10 buah jembatan pada jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. ● Perkantoran Bisnis:± 120 unit bangunan yang terdampak di delapan kecamatan dimana perusahaan terdampak paling besar di daerah pringapus dan bawen ● Perkantoran Pemerintahan:
--	--

	○ Kecamatan: 8 Unit, di Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus ○ Desa/Kelurahan:16 Unit di Kecamatan Tuntang, 10 Unit di Kecamatan Ambarawa, 8 Unit Kecamatan Bawen, 17 unit di kecamatan Pabelan, 10 unit di kecamatan Banyubiru, 18 unit di Kecamatan Suruh, 16 unit di Kecamatan Bringi, 8 unit di Kecamatan Pringapu Fasilitas Satuan Pendidikan ○ Sekolah Menengah (SMP & SMA dan setingkatnya): 5 unit di kecamatan Tuntang, 5 unit di Kecamatan Bawen,21 unit di Kecamatan Ambarawa, 7 unit di Kecamatan Pabelan, 7 Unit di Kecamatan Banyubiru,11 di Kecamatan Suruh, 7 di Kecamatan Bringin dan 5 di Kecamatan Pringapus ○ Sekolah Dasar (dan setingkatnya): 27 unit di kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen terdapat 25 unit, Kecamatan Ambarawa terdapat 29 unit. 21 unit di Kecamatan Pabelan, 23 Unit di Kecamatan Banyubiru, 38 di Kecamatan Suruh, 26 di Kecamatan Bringin dan 25 di Kecamatan Pringapus Fasilitas Kesehatan (dinkes pak wahyono) ○ Rumah Sakit 2 unit, terdampak rusak parah, di Kecamatan Ambarawa ○ Klinik terdampak ± 35 unit, rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus ○ Puskesmas terdampak ± 11 unit, rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus ○ Apotek terdampak ± 40 unit, rusak berat diusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus ○ Posyandu terdampak ± 638 unit, rusak berat di rusak berat - rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus ○ Rumah Bersalin & Praktek Bidan terdampak ± 155 unit unit,rusak berat rusak parah di delapan Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus ● Tempat ibadah terdampak ± 1043, rusak ringan-berat di delapan, Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, Pabelan, Banyubiru, Suruh, Bringin, Pringapus
--	---

	• Tempat Wisata terdampak, terdiri dari Tlogo resort dan banyumili , saloka, Goa Maria Rosa Mistika di (Kecamatan Tuntang), Banaran cafe, eling bening, Dusun semilir, PT coca cola, Agro wisata Pesanggrahan Watu di (Kecamatan Bawen), museum kereta api ambarawa melayani wisatawan Kereta Api mengingat secara fisik dua stasiun kereta di Kabupaten Semarang (Stasiun Tuntang dan Stasiun Ambarawa) memotong jalur sesar dan rel kereta api sepanjang ±.10 km berada di atas sesar, kampung rawa ambarawa, wisata alam pasekan, museum palagan ambarawa (Kecamatan Ambarawa), bukit cinta, pemandian muncul, curug kembar bolodewo, lereng kelir, taman kelinci, rekreasi langen tirta, di (Kecamatan Banyubiru), • Fasilitas PLN/Gardu Induk yang terganggu: GI Jelok Tuntang yang berada di kecamatan Tuntang serta PLTA Jelok Tuntang • Gangguan distribusi PDAM Sarana Tirta Ungaran di Kecamatan Tuntang, sumber air baku di permukaan yang berada di Sungai tuntang mengakibatkan gangguan distribusi di sebagian Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bergas dan Kecamtan Bawen, PDAM Cabang Ambarawa, PDAM Cabang Suruh • Industri terdampak di delapan Kecamatan terdiri dari Industri Tekstil dan Garmen, Industri minuman (coca- cola), industri Manufaktur di Kecamatan Bawen, dan Industri Tekstil dan Garmen, Industri bahan kimia di Kecamatan Pringapus • Pasar terdampak 15 lokasi pasar, Pasar Lopait, di Kecamatan Tuntang,Pasar Projo, Pasar Lanang, Pasar Surabaya, Pasar Gamblok di Kecamatan Ambarawa dan Pasar Hewan, Pasar Harjosari, di Kecamatan Bawen, Pasar Pebelan, Pasar Padaan di Kecamatan Pabelan, Pasar Banyu Biru, Pasar Kebondowo di Kecamatan Banyubiru, Pasar Bringin di kecamatan Bringin, Pasar Pringapus di Kecamatan Pringapus, Pasar Suruh, Pasar Plumbon di kecamatan Suruh • Utilitas transportasi: ○ Kabupaten Semarang ■ 3 Terminal: Terminal Bawen dan Terminal Ambarawa, Terminal Suruh ■ 2 Stasiun: Stasiun Tuntang dan Stasiun Ambarawa ■ Angkutan umum mempunyai trayek dengan tujuan 8 kecamatan terdapat 29 yang terganggu dari 45 trayek yang dilayani di Kabupaten semarang ■ 40 pol/Garasi angkutan umum yang rusak yang berjumlah 14pol/Garasi dari 59 pol/Garasi ■ Rel kereta api sepanjang ±.10 km berada di atas sesar.
ASPEK EKONOMI	Kegiatan Ekonomi Terganggu dan Cenderung Akan Lumpuh • Kota Semarang, kegiatan ekonomi akan lumpuh di Kecamatan: ○ Tugu, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Candisari, Gayamsari, Tembalang, Pedurungan, Semarang Utara,

	Semarang Timur. ● Kabupaten Semarang, kegiatan ekonomi akan lumpuh di Kecamatan: ○ Tuntang, Bawen, Pabelan, Banyubiru, Bringin, Pringapus, Ambarawa, Suruh Kehilangan dari Sektor Pasar ● Kota Semarang: ○ Pasar Mangkang ○ Pasar Jrakah ○ Pasar Bulu ○ Pasar Karangayu ○ Pasar Modern Mall (Matahari, Citraland, Informa) ○ Pasar Johar Lama ○ Pasar Peterongan ○ Java Mall ○ Sentra perdagangan MT Haryono ○ Pasar Mrican ○ Pasar Kapling ○ Pasar Meteseh ○ Pasar Pedurungan ○ Pasar Kokroso ○ Pasar Gayamsari ○ Sentra perdagangan Jurnatan ● Kabupaten Semarang: ○ Kecamatan Tuntang: 1 ○ Kecamatan Ambarawa: 4 ○ Kecamatan Bawen: 2 ○ Kecamatan Pabelan: 2 ○ Kecamatan Banyubiru: 2 ○ Kecamatan Bringin: 1 ○ Kecamatan Pringapus; 1 ○ Kecamatan Suruh:2 ○ pasar yang terhenti operasionalnya, Pasar Lopait, di Kecamatan Tuntang,Pasar Projo, Pasar Lanang, Pasar Surabaya, Pasar Gamblok di Kecamatan Ambarawa dan Pasar Hewan, Pasar Harjosari, di Kecamatan Bawen, Pasar Pebelan, Pasar Padaan di Kecamatan Pabelan, Pasar Banyubiru, Pasar Kebondowo di Kecamatan Banyubiru, Pasar Bringin di kecamatan Bringin, Pasar Pringapus di Kecamatan Pringapus, Pasar Suruh, Pasar Plumbon di kecamatan Suruh Kehilangan dari Sektor Peternakan dan Perikanan ● Kota Semarang 1. Tambak (Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Genuk) 2. Peternakan Ayam Petelur (Kecamatan Semarang Utara) ● Kabupaten Semarang ○ Karamba apung (rawa pening) ○ Ternak Warga terganggu berupa (ayam, Kambing, sapi Dll) Kehilangan dari Sektor Pertanian dan Perkebunan ● Kota Semarang
--	--

	Tidak terdampak ● Kabupaten Semarang Tidak terdampak Kehilangan dari Sektor Perindustrian ● Kota Semarang 1. Kawasan Industri Wijayakusuma (Kecamatan tugu) (Makanan, garmen, elektronik, dll 100 jenis izin industri) 2. Kawasan Industri Candi (Kecamatan Ngaliyan) Banyak jenis industri 3. Sentra Industri Ikan Asap (Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara) ● Kabupaten Semarang 1. Industri Tekstil dan Garmen, Industri minuman (coca- cola), industri Manufaktur di Kecamatan Bawen 2. Industri Tekstil dan Garmen, Industri bahan kimia di Kecamatan Pringapus Kehilangan dari Sektor Pariwisata ● Kota Semarang Selain banyaknya bangunan hotel yang roboh, andalan pariwisata di Kota Semarang adalah wisata kuliner dan wisata belanja. Sektor-sektor tersebut pasca bencana tentu saja akan terhenti. Hampir semua bahan baku kebutuhan sektor pariwisata di suplai dari luar Kota Semarang. Terputusnya jalur transportasi akan menyulitkan suplai bahan baku. Ekonomi Kota Semarang otomatis lumpuh. Sektor pariwisata di Kota Semarang terdampak paling parah karena Kawasan pariwisata di Kota Semarang terletak 90% di sekitar wilayah sesar Kendeng. ● Kabupaten Semarang Banyaknya wisata yang bertajuk alam serta beberapa bangunan, akses jalan serta penginapan yang mengalami kerusakan, sehingga otomatis sektor pariwisata terhenti untuk sementara, akses keluar masuk bahan baku kebutuhan sektor pariwisata yang disuplai dari luar kabupaten Semarang. Terputusnya jalur transportasi akan menyulitkan suplai bahan baku, sedangkan bahan baku kebutuhan sektor pariwisata yang disuplai dari dalam Kabupaten Semarang mengalami kerusakan yang diakibatkan gempa bumi, Pariwisata Kabupaten Semarang otomatis terhenti sementara. Kehilangan dari Sektor Transportasi Umum ● Kota Semarang, kehilangan pemasukan dari sektor transportasi umum pada BRT Trans Semarang, dan Kereta Api mengingat secara fisik empat stasiun kereta di Kota Semarang (Stasiun Mangkang, Stasiun Jragah, Stasiun Semarang Poncol, dan Semarang Tawang) berada di jalur sesar dan rel kereta api sepanjang ±16.41 km berada di atas sesar. Bandara Ahmad Yani berada di utara sesar sejauh 4 km akan terdampak pula. ● Kabupaten Semarang, kehilangan pemasukan dari sektor
--	--

	transportasi umum, Kopja Trans Jawa Tengah, dikarenakan beberapa jalan dan halte BRT mengalami kerusakan yang diakibatkan gempa yang berlokasi di sekitar daerah rawa pening
ASPEK LINGKUNGAN	Air Suplai air baku jauh berkurang (lihat dampak fisik terhadap suplai air baku PDAM), kondisi air bersih di Kab/Kota terdampak akan menjadi keruh. Permasalahan air bersih akan menjadi sumber permasalahan utama ketika terjadi gempa bumi. Tanah/Lahan • Dampak terhadap hilangnya/terganggunya lahan untuk perkebunan, pertanian, dan permukiman akan terjadi terutama di wilayah Kabupaten Semarang. Lahan perkebunan kemungkinan akan dijadikan wilayah pengungsi yang berasal baik dari Kabupaten Semarang maupun dari Kota Semarang, mengingat sulitnya mencari lahan terbuka di Kota Semarang. • Pada wilayah pemukiman, terutama pemukiman padat, akan terdampak parah dengan hancurnya sarana fasos/fasum seperti rusaknya MCK, saluran drainase, septic tank komunal, TPS sampah bahkan TPA sampah. • Munculnya berbagai macam wabah penyakit seperti Diare, DBD, Leptospirosis, Typhoid dan wabah penyakit lainnya bila permasalahan sanitasi lingkungan tidak segera diatasi Udara Dampak pada kualitas udara (peningkatan debu, asap, kualitas udara menurun akibat tercemar bau dari proses pembusukan) terutama di wilayah-wilayah padat penduduk dan rentan kebakaran Hutan • Disamping luasan hutan di dua kabupaten/kota terdampak sudah sangat kecil karena alih fungsi lahan, dampak susulan gempa berupa longsor di beberapa wilayah rentan akan lebih mengurangi luasan hutan yang ada, sehingga memperparah kondisi ekosistem. Kemungkinan besar, hewan-hewan seperti monyet, babi hutan, binatang melata akan bermigrasi ke wilayah lain atau bahkan mungkin akan bermigrasi ke wilayah pengungsian.
ASPEK LAYANAN PEMERINTAHAN	• Kota Semarang, layanan pemerintahan mulai dari level kelurahan dan kecamatan akan terfokus pada proses penanganan bencana hingga masa transisi rehab-rekon kurang lebih sekitar 14 hari sampai dengan 1 bulan. Layanan pemerintahan di tingkat Kota akan terhambat relatif lebih lama terutama pada bangunan2 pemerintahan yang roboh dan belum menggunakan sistem digital untuk backup data arsip • Kabupaten Semarang, kurang lebih sama dengan Kota Semarang, untuk layanan tingkat Kabupaten kemungkinan terganggu karena dampak yg cukup parah terkait jarak dari pusat gempa, namun jika dilihat dari banyaknya Kawasan terbuka di sekitar lokasi pusat pemerintahan, akan

	memudahkan dalam pembangunan kantor-kantor pelayanan pemerintahan darurat di sekitar lokasi pemerintahan eksisting ○ Pelayanan Kesehatan dan pendidikan terganggu diakibatkan kejadian gempa yang mengharuskan adanya kantor-kantor darurat yang dibentuk di area yang aman, sehingga pelayanan dapat b
--	--

BAB II
TUGAS POKOK

Organisasi (Komando) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendudukan dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Semarang, SKPDB Kota Semarang dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

SKPDB Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi pendudukan dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat - Transisi Darurat ke pemulihan) selama 30 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana serta meminimalisir dampak dan kerugian ekonomi akibat bencana.

BAB III
PELAKSANAAN

3.1 Konsep Operasi & Rencana Tindakan

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah melaksanakan operasi pendudukan, pendampingan, dan penguatan kepada SKPDB Kota Semarang dan SKPDB Kabupaten Semarang ,dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan dasar warga terdampak bencana Gempabumi Sesar Kendeng, serta kesiapan pelayanan penanganan warga terkonfirmasi COVID-19, mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari, di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

Operasi pendudukan dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu fase tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana

Tabel 3. Konsep Operasi Penanganan Darurat Gempa Bumi Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah

Fase Tanggap Darurat	● Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan ● Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk pendukung ● Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana gempabumi Sesar Kendeng Tingkat Provinsi ● Pembentukan Pos Lapangan ● Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Sesar Kendeng di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ● Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Sesar Kendeng di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ● Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda. ● Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa kebencanaan ● Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan). ● Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID-19). ● Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan rujukan.
Transisi Darurat	● Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan. ● Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana - prasarana vital. ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang. ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang. ● Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat. ● Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi. ● Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang.

3.2 Fungsi

3.2.1. Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB Kota Semarang, SKPDB Kabupaten Semarang dalam penanganan darurat bencana gempa bumi akibat Sesar Kendeng, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem dengan bidang-bidang/fungsi-fungsi spesifik. 5 bidang fungsi pokok diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik; (e) administrasi dan keuangan. Penjabaran fungsi masing masing bidang operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

- a) Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng.
- b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng.
- c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
- d) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng.

2) Bidang Perencanaan

Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Gempabumi Sesar Kendeng secara terpadu serta memastikan komando dan komunikasi terkait operasi pelaksanaan darurat bencana.

3) Bidang Operasi

Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana yang secara terpadu secepat mungkin dan tepat.

4) Bidang Logistik

Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.

5) Bidang Administrasi dan Keuangan

- a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana dan memberikan petunjuk terkait keuangan secara keseluruhan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana.
- b) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

3.3 Tugas-Tugas

3.3.1 Provinsi Jawa Tengah

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang-fungsi bersama bagian/unit/divisi di bawahnya. Agar perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi mendukung penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang (yang) berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas dalam Satgas Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah.

1. Komandan PDB

- Mengaktifkan menjadi Pos Komando (Posko) Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi pendukung penanganan kedaruratan bencana tingkat provinsi.
- Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk SKPDB Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
- Melaksanakan pengerahan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk pendukung operasi penanganan darurat

2. Wakil Komandan PDB

- Membantu Komandan Tanggap Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
- Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- Mewakili Komandan PDB apabila Komandan PDB berhalangan.

3. Hubungan Masyarakat

- Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- Memastikan alur komunikasi antar bidang dalam satgas provinsi dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
- Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.

4. Keselamatan dan Keamanan

- Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Satgas dalam menjalankan tugasnya.
- Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
- Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.

5. Perwakilan Lembaga/Instansi

- Bertugas untuk membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.

- Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

6. Sekretariat

- Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Provinsi.
- Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Komando Provinsi, Kesekretariatan, Pos Pendukung/Pendamping.

7. Perencanaan

1) Unit Sumber Daya

- a) Menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang diperlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana (SDM, peralatan, logistik, transportasi dll).
- b) Mengelola bantuan sumberdaya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari luar.

2) Situasi

- a) Menyusun rencana aksi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan aksi
- b) Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan melaporkan update cuaca kepada tim, sebagai bahan pertimbangan aksi
- c) Membuat update informasi terkait kondisi kejadian bencana gempa yang terjadi dan membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian gempa
- d) Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak
- e) Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display-display dan peta- peta

8. Operasi/Pos Lapangan

Operasi penanganan kedaruratan bencana gempa bumi akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan mengaktivasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB).

Pos ini berfungsi melaksanakan operasi pendudukan penanganan darurat bencana. Terdapat 2 (dua) Pos Lapangan PDB Provinsi Jawa Tengah yang diaktivasi untuk mendukung, memperkuat, dan mendampingi SKPDB Kabupaten/Kota, yaitu (1) Pos Lapangan Kota Semarang, (2) Pos Lapangan Kabupaten Semarang.

Sesuai dengan prinsip pengutamaan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan kedaruratan bencana, tugas pokok pos lapangan adalah untuk memastikan berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana. Pos Lapangan berfungsi sebagai (1) tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan, (2) sebagai wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait, dan (3) sebagai tempat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

Untuk memastikan operasi penanganan darurat, Pos Lapangan PDB Provinsi mengarahkan sumberdaya (deployment) termasuk penugasan personil ke dalam bidang/sektor penanganan sesuai dengan bidang/sektor yang dalam SKPDB Kabupaten/Kota.

Bidang/Sektor tersebut adalah:

1) *SAR dan Evakuasi*

- a) Mendukung *assessment* masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan)
- b) Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase)
- c) Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban)
- d) Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah)
- e) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam operasi SAR dan Evakuasi

2) *Kesehatan*

- a) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan kesehatan klinis, serta kesehatan COVID-19), termasuk pelayanan ambulans
- b) Memastikan dan mendukung adanya pemetaan area bencana (bersama RHA/rapid health assessment)
- c) Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang kesehatan
- d) Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan COVID-19
- e) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan psikososial dan pengobatan, termasuk COVID-19
- f) Memastikan dan mendukung upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
- g) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.
- h) Memastikan pemenuhan standar minimal bantuan kesehatan

3) *Pendidikan*

- a) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan
- b) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan
- c) Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak
- d) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat
- e) Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain
- f) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam penanganan bidang pendidikan

4) *Pengungsian*

- a) Memastikan dan mendukung *assessment* (pendataan) pengungsi dan kelompok rentan serta verifikasi dan pemutakhiran data berkala
- b) Mendukung pendistribusian bantuan pangan-sandang
- c) Mendukung pengelolaan dapur umum
- d) Memastikan dan mendukung penyediaan dan pendirian penampungan darurat (titik-titik pengungsian)
- e) Memastikan dan mendukung pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK
- f) Memastikan dan mendukung pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian
- g) Memastikan dan mendukung penegakan protokol kesehatan COVID-19

- h) Memastikan dan mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan COVID-19
- i) Memastikan dan mendukung fasilitasi isolasi/karantina COVID-19

5) *Air Bersih dan Sanitasi*

- a) Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga.
- b) Memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- c) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- d) Memastikan dan mendukung pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja.

6) *Sarana Prasarana*

- a) Memastikan dan mendukung upaya perbaikan sarana dan prasarana vital di lokasi bencana
- b) Memastikan dan mendukung pengaturan akses transportasi: Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara
- c) Mendukung pembangunan jembatan sementara untuk jembatan rusak
- d) Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda
- e) Memastikan dan mendukung penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan sementara
- f) Memastikan dan mendukung penyiapan MCK sementara
- g) Memastikan dan mendukung penyiapan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara
- h) Memastikan dan mendukung penyiapan genset yang memadai untuk suplai listrik
- i) Mendukung pendirian sarana ibadah sementara/Tenda
- j) Memastikan dan mendukung perbaikan sarana pendidikan sementara/ membangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar
- k) Mendukung penyediaan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.
- l) Memastikan dan mendukung penyiapan posko dan fasilitas-fasilitas pendukung

9. Logistik

1) *Unit Peralatan*

- a) Menyediakan peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase menuju pemulihan.
- b) Menyiapkan tenda posko, pos kesehatan, hunian sementara, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.
- c) Mekanisme pengamanan logistik dari penerimaan sampai pendistribusian

2) *Unit Transportasi*

- a) Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi

- b) Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat
- c) Mengkoordinasikan sumber daya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi
- d) Mengerahkan sumber daya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana
- e) Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.

3) *Unit Pergudangan*

- a) Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan dll untuk korban bencana, membuat suatu manajemen penyimpanan penyaluran makanan dll, pengendalian.
- b) Membuat tenda pergudangan, membuat suatu manajemen dokumen stok barang masuk dan barang keluar, serta membuat lampiran ketersediaan barang, melakukan koordinasi dan pengendalian.

4) *Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi*

- a) Merencanakan, mendata, memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi pengungsi.
- b) Memenuhi bantuan pangan dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
- c) Memenuhi bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus.
- d) Membuat suatu penganggaran kebutuhan pangan.
- e) Melakukan suatu manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian.
- f) Membuat dapur khusus untuk semua tim penyelamat.

5) *Unit Kesehatan*

- a) Menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.
- b) Mencari kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.
- c) Pendistribusian tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan, termasuk dalam penanganan COVID-19.

6) *Hunian dan Bantuan Non-Pangan*

- a) Menyiapkan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara.
- b) Memberikan bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat-alat perkakas.

10. **Administrasi dan Keuangan**

- a) Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar
- b) Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan
- c) Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan
- d) Menyiapkan bahan pengkordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan

- e) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

11. Pos Pendukung

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB) merupakan perangkat organisasi dalam penanganan kedaruratan bencana gempabumi akibat Sesar Kendeng. Pos Pendukung memiliki fungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tugas-tugas Pos Pendukung PDB bantuan dari dalam negeri antara lain adalah:

- a) Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;
- b) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima;
- c) Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB;
- e) Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk;
- f) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.

Kegiatan utama Pos Pendukung PDB bantuan dari luar negeri antara lain adalah:

- a) Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;
- b) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan;
- c) Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e) Melakukan pengelolaan perizinan;
- f) Melakukan pengembalian bantuan;
- g) Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
- h) Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
- i) Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional; dan
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.

12. Pos Pendamping

Pos Pendamping merupakan perangkat PDB yang berfungsi memastikan dan menjamin berjalannya operasi pendudukan, perkuatan, dan pendampingan strategi dan taktis agar penanganan kedaruratan bencana berjalan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektivitas terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat, Pos Pendamping berperan untuk melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya, pengelolaan bantuan sumber daya, dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas

- a) melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota;
- b) melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana;
- c) mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan;
- d) menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
- e) melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan;
- f) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

3.4 Instruksi Koordinasi

3.4.1. Provinsi Jawa Tengah

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempabumi Sesar Kendeng

BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana gempabumi Sesar Kendeng. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

Apa	Jenis Bencana
Bilamana	Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
Dimana	Tempat/lokasi/daerah bencana
Berapa	Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana

Penyebab	Penyebab terjadinya bencana
Bagaimana	Upaya yang telah dilakukan

Analisa akibat langsung dari kejadian gempa bumi Sesar Kendeng dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Jawa Tengah menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Provinsi Jawa Tengah atas hasil pengkajian cepat akibat gempabumi Sesar Kendeng.
 - b. Pertimbangan dan masukan dari Walikota Semarang dan Bupati Semarang, serta para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah.
 - i. Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - ii. Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus keputusan mengaktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana gempabumi akibat Sesar Kendeng.
 - iii. Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten/kota merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk oleh masing-masing Bupati/Walikota.
3. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
4. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempabumi Akibat Sesar Kendeng.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

4.1.1. Provinsi Jawa Tengah

Pengeralan/mobilisasi sumberdaya untuk pendudukan penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD Jawa Tengah sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengeralan sumberdaya Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat provinsi dilihat Lampiran

Biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah bersumber dari:

1. APBD Provinsi
2. APBN
3. Bantuan lain yang tidak mengikat.

4.2 Logistik

4.2.1. Provinsi Jawa Tengah

Pengeralahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
1. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
2. Apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
3. Biaya yang timbul akibat pengeralahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan pengeralahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
5. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
6. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana

BAB V

KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI

5.1. Komando

5.1.2. Provinsi Jawa tengah

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Akibat Sesar Kendeng Provinsi Jawa Tengah dipimpin Gubernur¹, Wakil Gubernur, dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten/Kota, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota	Lokasi	Koordinat
Kabupaten Semarang	Kantor Bupati Kabupaten Semarang	-7.129224, 110.403900
Kota Semarang	Kantor BPBD Prov Jawa Tengah	-6.969617, 110.422561

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara A. Yani /Pangkalan TNI AD	-6.965887, 110.375869
Pos Pendukung 2	Pelabuhan Tanjung Emas	-6.946997, 110.424246
Pos Pendukung 4	Pintu Tol Kalikangkung	-6.987790, 110.316862
Pos Pendukung 5	Pintu Tol Ungaran	-7.138242, 110.419834
Pos Pendukung 6	Pintu Tol Jatingaleh	-7.031308, 110.421172
Pos Pendukung 7	Pintu Tol Gayamsari	-6.999076, 110.451149
Pos Pendukung 8	Stasiun Tawang	-6.964507, 110.427779
Pos Pendukung 9	Stasiun Poncol	-6.973116, 110.414945

¹ *) Instruksi Presiden Jokowi dalam Rakornas PB 2019
(<https://bnpb.go.id/berita/6-enam-arahan-presiden-joko-widodo-saat-rakornas-pb-2019-di-surabaya-2-febuari-2019>)

Pos Pendukung 10	Terminal Penggaron	-7.017570, 110.493348
Pos Pendukung 11	Pintu Keluar Tol Ungaran	-7.138242, 110.419834
Pos Pendukung 12	Pintu Keluar Tol Bawen	-7.245952, 110.446906
Pos Pendukung 13	Pintu Keluar Tol Tingkir	-7.362319, 110.532681

d. Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional (Pospenas atau Pos BNPB) berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.

5.2. Kendali

- 1. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana

5.3. Koordinasi

3.3. Provinsi Jawa Tengah

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

5.4. Komunikasi

4.3. Provinsi Jawa Tengah

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi
- Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX san 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.

b. Telepon : 024-3519904

c. Email : bpbd_jateng@jatengprov.go.id

d. Faksimile : 024-3519186

Existing Renkon Jawa Tengah

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng dilaksanakan sebagai berikut:

a. Rencana Operasi

Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut Rencana Tindakan Operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.

b. Permintaan Sumberdaya

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi.
2. Kepala BPBD Provinsi sesuai dengan lokasi, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.
3. Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Departemen/Dinas Sosial, BULOG/DOLOG, Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Pekerjaan Umum, Departemen/Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Departemen/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.
4. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana. 5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD dan atau Departemen Keuangan.

c. Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD maupun BNPB sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

d. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana menyiapkan dan menghimpun dukungan

operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

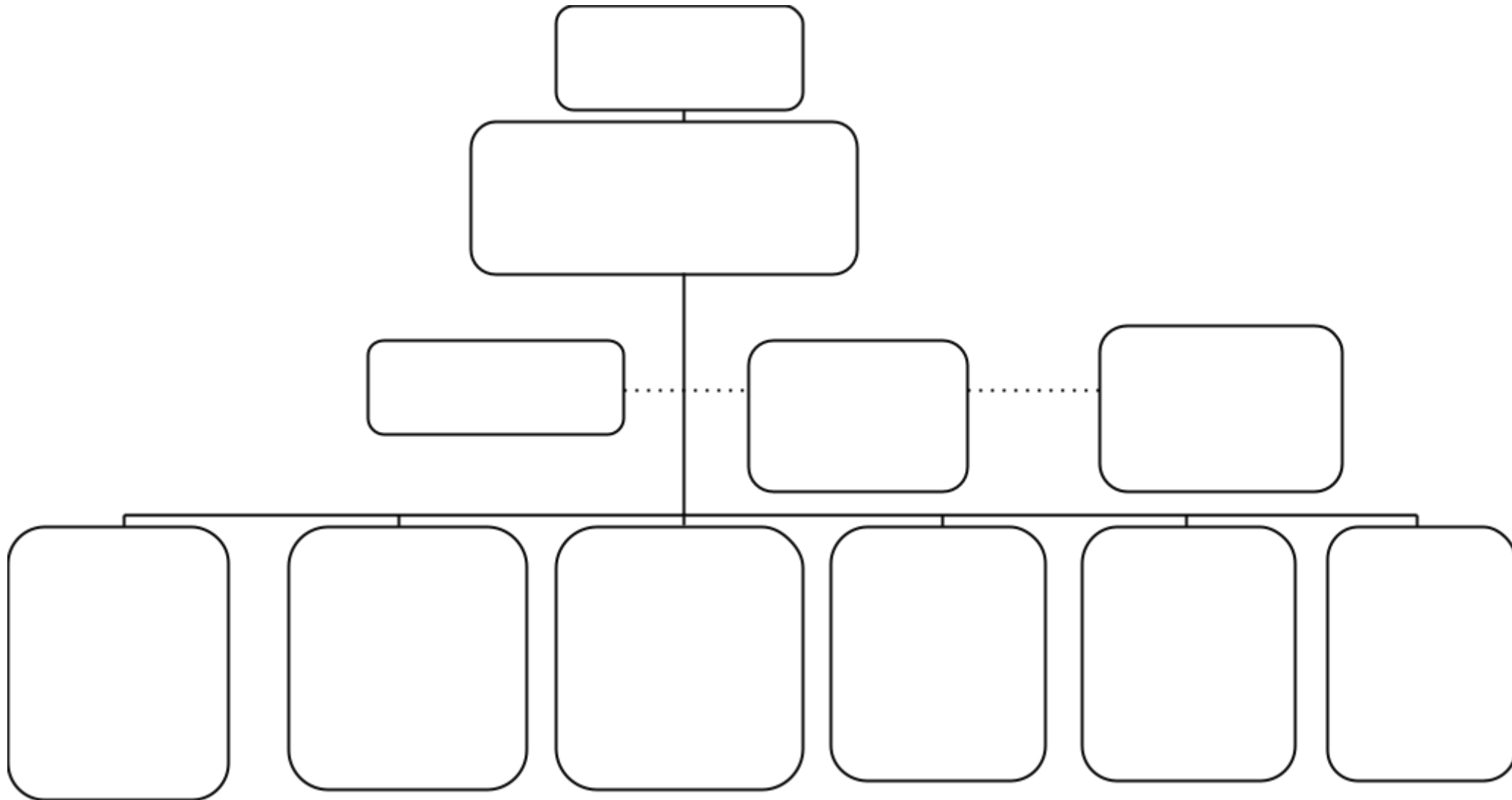
1. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.
2. Personil Komando, semua sumber daya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan PDB.
3. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
4. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
5. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
6. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
7. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

e. Pengakhiran

1. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Provinsi membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.
2. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.
 - Pos Komando SKPD Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
 - Pos Pendamping berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
 - Pos Pendukung berkedudukan di Posko SKPDB Kabupaten/Kota.
 - Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berkedudukan di tiap Kabupaten/Kota.

Lampiran-A : Struktur Organisasi Pos Pendamping

Struktur Organisasi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng di Prov. Jawa Tengah



Lampiran-B : Susunan Fungsi

SUSUNAN TUGAS - FUNGSI

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan Pos Pendamping dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)
1	Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2.	Wakil Koordinator :	
	a. Pangdam IV Diponegoro b. Kapolda Jawa Tengah c. BPBD Prov. Jawa Tengah	
3	Sekretaris	
	Pemimpin (lead) :	Kabag TU BPBD Prov. Jateng
	Pendukung :	BPBD Prov. Jateng
4.	Bidang Data, Informasi dan Humas	
	Pemimpin (lead) :	Diskominfo Prov. Jateng
	Pendukung : Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Pusdalops BPBD Prov Jateng, BMKG Jawa Tengah, ORARI, RAPI, Senkom, Dinas ESDM Jawa Tengah	
5	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
	Pemimpin (lead) :	Ketua FPRB Jawa Tengah
	Pendukung :	Ketua Forum CSR Ketua FPT PRB Jawa Tengah Ketua LIDI Ketua Organda Ketua MDMC Jawa Tengah Ketua LPBI NU Jawa Tengah Ketua KWARDA Jawa Tengah Ketua PMI Jawa Tengah Ketua BANSER Jawa Tengah Ketua BAZNAS Jawa Tengah
6	Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	
	Pemimpin (lead)	Kepala Kantor SAR Semarang

No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah PMI Jawa Tengah BPBD Jawa Tengah SARDA Jawa Tengah MDMC Jawa Tengah KWARDA Jawa Tengah Human Initiative
7	Bidang Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
	Pemimpin (lead)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah Biro Kesra Setda Jawa Tengah Dinas Sosial Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah PMI Jawa Tengah
8	Bidang Operasi Kesehatan dan Psikososial	
	Pemimpin (lead)	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah Dinas Sosial Jawa Tengah PMI Jawa Tengah MDMC Jawa Tengah KWARDA Jawa Tengah Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) Jawa Tengah RSUD milik Provinsi Jawa Tengah RSU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

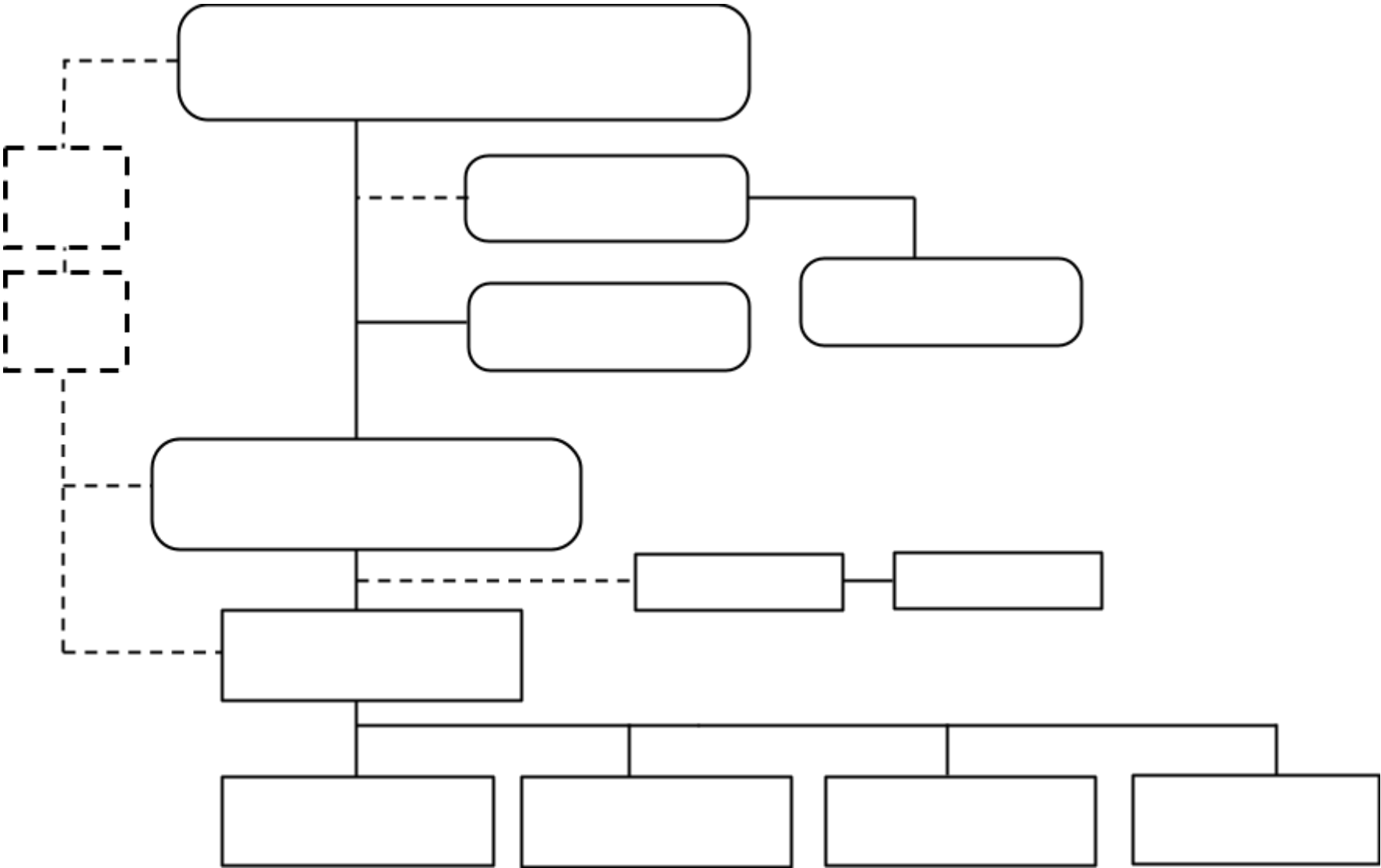
No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
9	Bidang Operasi Logistik dan Dapur Umum	
	Pemimpin (lead)	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro POLDA Jawa Tengah Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tagana BPBD Jawa Tengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah SARDA Jawa Tengah Forum CSR PMI Jawa Tengah BAZNAS Jawa Tengah Forum Zakat Human Initiative
10	Bidang Operasi Pendidikan	
	Pemimpin (lead)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
	Pendukung	Kanwil Kemenag Jawa Tengah Direktorat BINMAS POLDA Jawa Tengah Direktorat LANTAS POLDA Jawa Tengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Disporapar Jawa Tengah PMI Jawa Tengah
11	Bidang Operasi Keamanan	
	Pemimpin (lead)	POLDA Jawa Tengah
	Pendukung	KODAM IV Diponegoro SATPOL PP Jawa Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. SAFRUDIN, M.Si

NIP. 19690603 199403 1 007

JARING KOMUNIKASI POS PENDAMPING RENKON
GEMPA BUMI AKIBAT SESAR KENDENG
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran-D: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

No	Tugas	Estimasi Ketersediaan Sumberdaya		Estimasi Kebutuhan	Estimasi Ketersedian	Gap
		Kebutuhan	Ketersediaan			
1	Perencanaan	1. Ahli Manajemen Bencana 2. Ahli Geologi kegempaan 3. Ahli trauma healing dan mental healthy 4. Ahli epidemi 5. Ahli kesehatan 6. Keuangan	1. BPBD Prov Jateng 2. BMKG 3. Satgas Covid Prov Jateng 4. IDI Prov Jateng 5. Bappeda	2 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang		
2	Personil	Tim Evakuasi untuk menolong korban terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	1. Personil TRC Prov Jateng 2. Personil TNI 0714 3. Perosnil Polisi 4. Personil SAR Prov Jateng 5. Personil Basarnas 6. POL PP 7. TAGANA	50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 orang (pershift) 50 oarang (pershift)		
		Tim kesehatan dan epidemolgi untuk mengecek kesehatan warga terdampak dan	1. Dokter Anak 2. Dokter Orthopedi 3. Dokter Radiologi 4. Dokter Kejiwaan	8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 8 orang (pershift)		

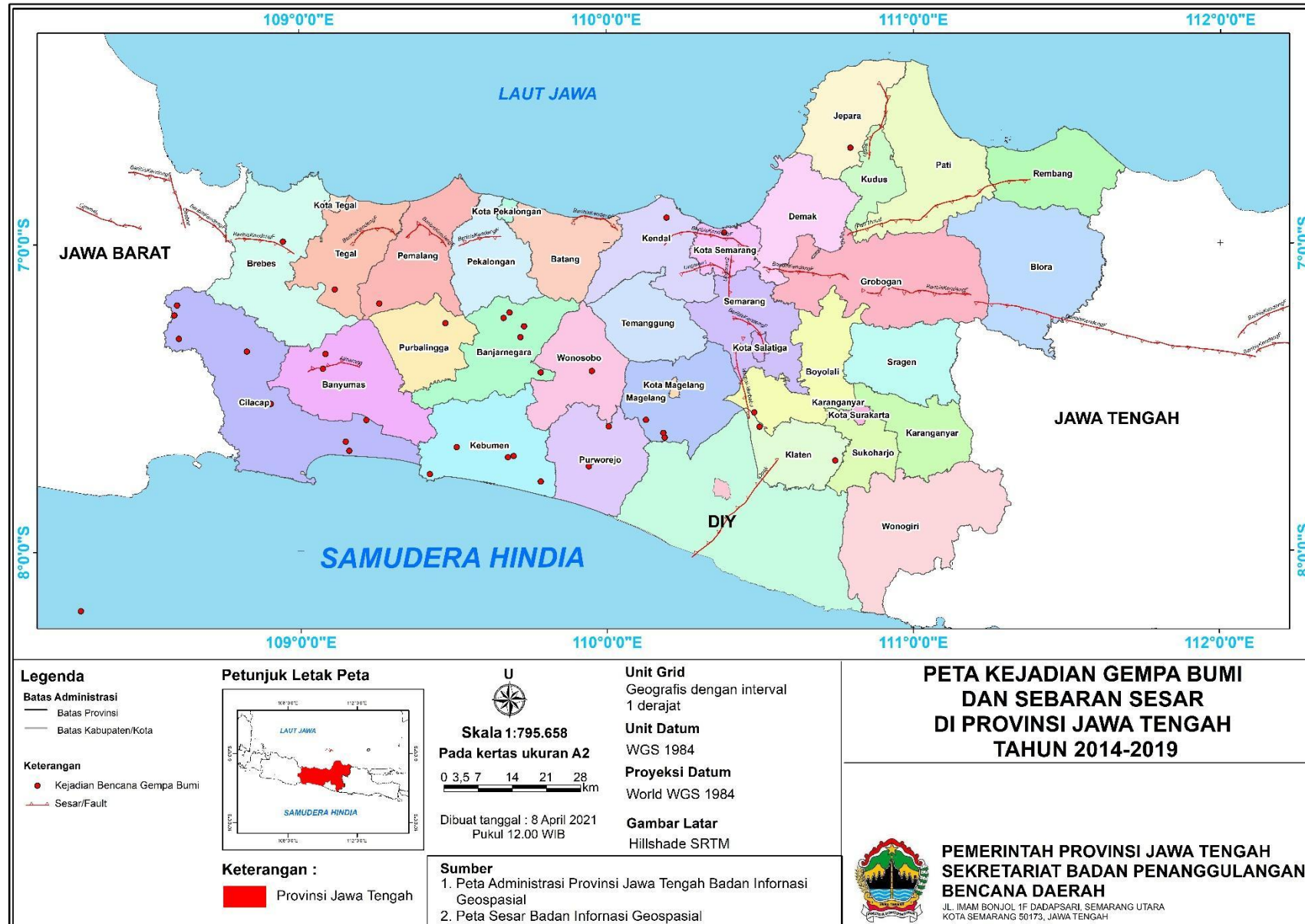
		memastikan warga mengetahui protokol kesehatan COVID, 19 di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	5. Dokter kandungan 6. Dokter umum 7. Perawat 8. Bidan 9. Kesehatan Masyarakat 10. Tenaga Laboratorium 11. Tim pendukung lainnya	8 orang (pershift) 8 orang (pershift) 16 orang (pershift) 8 orang (pershift) 16 orang (pershift) 8 orang (pershift) (silahkan diisi)		
		Tim pangan dan logistik untuk memastikan ketersediaan makanan dan air bersih untuk keperluan sanitasi di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	1. Personil Dinas sosial (dapur umum) (untuk 2. Personil PDAM 3. Personil DLH 4. Personil	24 orang (pershift) 8 orang 10 orang		
		Tim informasi dan komunikasi untuk mengetahui kondisi terkini	1. Personil dinas kominfo 2. Personil Rapi 3. Personil Orari	5 orang 10 orang 10 orang		
		Tim poskomando penanganan darurat bencana memonitoring serta merencanakan kegiatan tanggap darurat dan transisi darurat	Gabungan BPBDProv Jateng, Polisi, Pol PP	2 orang setiap opd		

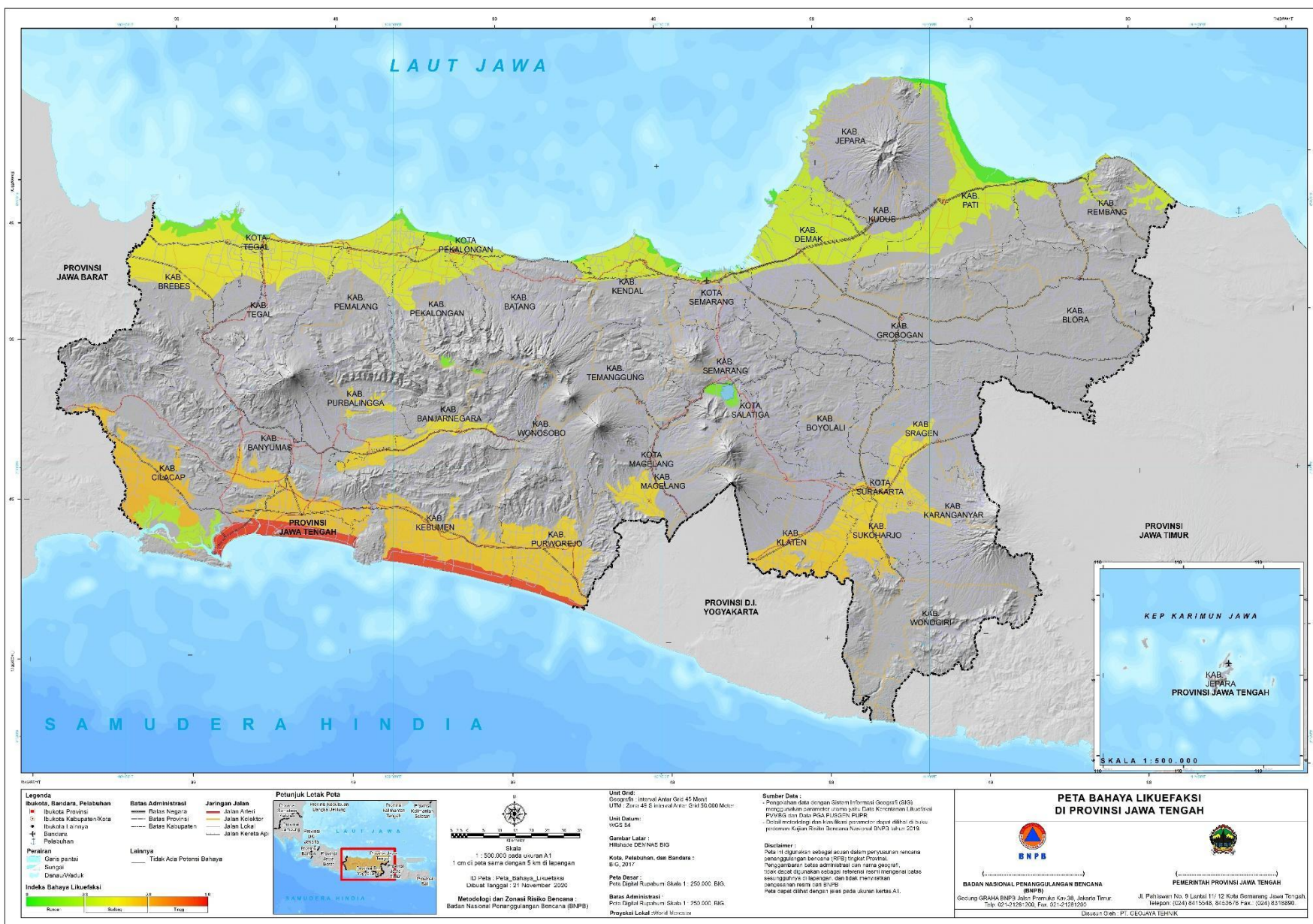
3	Peralatan dan Oprasi	Unit kendaraan dan peralatan untuk evakuasi di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	1. Eskavator Dari Dinas PU dan dinas 2. Pickup dari BPBD, Dinas PU 3. Bego dari dinas PU, BPBD dan dinas 4. Truk dari (TNI, Plisi, Pol PP, BPBD, Dinas PU 5. Mobile Rescue dinas	16 unit 10 unit 8 unit 30 unit 8 unit		
		Unit kendaran dan perlengkapan kesehatan dan medis untuk penanganan dan tindakan medis di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	1. Ambulan dari PMI, Rumah sakit 2. Mobil jenazah dari PMI, Rumah sakit	16 unit 16 unit		
		Unit kendaraan sampah	1. Truk sampah dari DLH	8 unit		
		Unit angkut sampah Tempat sampahinfeksius dan domestik				
		Dapur umum untuk	1. Mobil dapur	16 unit		

		setiap kecamatan	umum			
		Mobil air bersih setiap kecamatan	1. Truk suplay air bersih	16 unit		
		Handy Talky 10 HT per kecamatan	1. HT Masing masing petugas di kecamatan	80 unit		
		Tenda pendukung	1. Tenda dapur umum (Dinsos dan BPBD) 2. Tenda Kesahtan (Dinkes dan PMI) 3. Tenda isolasi (Dinkes, BPBD dan PMI) 4. Tenda Komando (TNI POLISI)	10 unit 16 unit 16 unit 10 unit		
		Kantong jenazah untuk masayrakat yang meninggal akibat gempa	1. Kantong jenazah	4000 kantong		
4	Logistik	Kebutuhan beras untuk warga terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Beras : 0,4 kg per hari x 387.120 jiwa terdampak x 14 hari= 2.167.888 kg	2.167.888 kg		

		Kebutuhan air bersih untuk warga terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Air bersih : 2 liter x 387.120 jiwa x 14 hari = 10.839.360 liter	10.839.360 liter		
		Lauk Pauk untuk warga terdampak di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang	Lauk pauk @6000 x 3 x 14hari x 387.120 jiwa	Rp 975.492.000.000		
		Multivitamin untuk dayatahan tubuh warga terdampak	Multifitamin 387.120 x 1 botol	387.120 botol		
5	Administrasi dan sekretariat an	Admin Keuangan Database Staf umum	Bappeda dan BPBD Database Pusdalops BPBD Satf umum BPBD	2 orang 2 orang 2 orang		

Lampiran-E : Peta-Peta







Lampiran-F : SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RENCANA KESIAPSIAGAAN POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GEMPA AKIBAT SESAR KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEGIATAN	BMKG BANJARNEGARA	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Kejadian Tektonik Gempa Sesar									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status Gempa Sesar dan Susulan jika ada	
2	Melakukan rapat koordinasi bersama BMKG Banjarnegara untuk mengkaji dan menganalisis skenario gempa melihat dari aktivitas susulan									Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario erupsi yang akan terjadi	
3	Menyiagakan personil yang akan ditugaskan pertama menuju lokasi kejadian bencana di 5 kabupaten terdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB	30 menit	Data personil TRC	
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personil	
5	Menyiagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu di PUSDalops BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personil	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TANGGAP DARURAT POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GEMPA AKIBAT SESAR KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEGIATAN	PVMBG/POS PGA SLAMET	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Aktivitas Gempa di Lokasi Episentrum setelah gempa utama									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan aktivitas kegempaan	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan penunjang	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TRANSISI DARURAT POS PENDAMPING DARURAT BENCANA GEMPA AKIBAT SESAR KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEGIATAN	PVMBG/POS PGA SLAMET	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Penurunan aktivitas gempa di lokasi episentrum									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan status kegempaan	
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer.	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana	

Lampiran-G : Lembar Komitmen

**LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI GEMPA AKIBAT SESAR KENDENG
PROVINSI JAWA TENGAH 2021**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari serangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Akibat Sesar Kendeng di Jawa Tengah

PANGDAM IV DIPONEGORO

KAPOLDA JAWA TENGAH

BAKTI AGUS FADJARI, S.IP
Mayor Jenderal TNI

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., M.K.
Inspektur Jenderal Polisi

WALIKOTA SEMARANG

BUPATI SEMARANG

DR. HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M

H. NGESTI NUGRAHA, S.H, M.H

Lampiran-H : Lembar Berita Acara Penyusunan Renkon

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI AKIBAT SESAR
KENDENG

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng pada tanggal 21 Mei s.d 23 November 2021 di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

1 SEKRETARIS DAERAH PROV. JAWA TENGAH	2 KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV.JAWA TENGAH	3 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROV.JAWA TENGAH
4 KETUA FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA PROV.JAWA TENGAH	5 KEPALA KANTOR SAR KOTA SEMARANG	6 KEPALA DINAS PENDEKIDUKAN DAN KEBERHAKMUKAN PROV.JAWA TENGAH
7 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV.JAWA TENGAH	8 KEPALA DINAS KESEHATAN PROV.JAWA TENGAH	9 KEPALA DINAS SOSIAL PROV.JAWA TENGAH

Lampiran-I : Berita Acara Peserta Penyusunan Renkon Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng Tingkat Provinsi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Gempa Bumi Akibat Sesar Kendeng, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Tengah	Sekretaris Bid. Data, Informasi dan Humas Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Logistik dan Dapur Umum	
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Penelitian Pengembangan Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPUSDATARU) Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
4	Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum	
6	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
9	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
10	Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Pendidikan Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
11	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
12	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Keamanan	
13	Biro Hukum Setda Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
14	Panglima Kodam IV Diponegoro	Wakil Koordinator Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Keamanan	
15	POLDA Jawa Tengah	Wakil Koordinator Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Keamanan	
16	SAR Semarang	Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	
17	Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial Bid. Logistik dan Dapur Umum Bid. Operasi Pendidikan	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
18	Sentra Komunikasi (SENKOM) Mitra Polri	Bid. Data, Informasi dan Humas	
19	Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI)	Bid. Data, Informasi dan Humas	
20	ORARI Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
21	SARDA Jawa Tengah	Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Logistik dan Dapur Umum	
22	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
23	Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
24	Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
25	Forum Zakat Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
26	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Logistik dan Dapur Umum	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
27	Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
30	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
31	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Prov. Jawa Tengah	Bid. Logistik dan Dapur Umum	
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Keamanan	
33	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jawa Tengah	Bid. Operasi Sarana dan Prasarana Pengungsian	
34	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	
35	Pusdalops BPBD Prov. Jawa Tengah	Bid. Data, Informasi dan Humas	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
36	BMKG Jawa Tengah Stasiun Banjarnegara	Bid. Data, Informasi dan Humas	
37	Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
38	Direktorat BINMAS POLDA Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
39	Direktorat LANTAS POLDA Jawa Tengah	Bid. Operasi Pendidikan	
40	Forum CSR Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Logistik dan Dapur Umum	
41	Unit Layanan Disabilitas	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	
42	MDMC Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Operasi Kesehatan dan Psikososial	
43	LPBI NU Jawa Tengah	Perwakilan Instansi/Lembaga terkait	

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	PERAN	TANDA TANGAN
44	Human Initiative	Bid. Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bid. Logistik dan Dapur Umum	

